

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, kualitas pengawasan BPD, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Jasinga, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Jasinga, hal ini dikarenakan beberapa desa yaitu 7 desa di Kecamatan Jasinga belum menerapkan prinsip transparansi, pada implementasinya beberapa desa di Kecamatan Jasinga tersebut belum mampu menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat berupa dokumen publik, dokumen publik berupa adanya banner/spanduk di kantor desa mengenai laporan keuangan desa seperti LRA 2022 dan informasi APBDes 2023, sedangkan pemasangan banner/spanduk merupakan cara termudah yang dapat dilakukan oleh aparatur desa untuk menciptakan transparansi.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Jasinga, hal ini dibuktikan dari tanggapan responden dimana mayoritas responden menjawab pertanyaan pada skala tertinggi artinya akuntabilitas pada desa di Kecamatan Jasinga sangat sering dilaksanakan baik pada dimensi akuntabilitas kejujuran & hukum, akuntabilitas program dan akuntabilitas proses, maupun akuntabilitas kebijakan.
3. Kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Jasinga, hal ini dibuktikan dari tanggapan responden dimana mayoritas responden menjawab pertanyaan pada skala tertinggi artinya pengawasan BPD sudah dilaksanakan secara berkualitas, BPD melaksanakan pengawasan secara rutin, pengawasan dilaksanakan

berdasarkan peraturan yang berlaku, dan BPD sudah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak aparaturnya.

4. Kompetensi aparaturnya tidak berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Jasinga, hal ini dibuktikan pada nilai rata-rata terkecil tanggapan responden berada pada dimensi kemampuan yaitu aparaturnya belum mampu melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yaitu pencatatan secara akrual, aparaturnya pada desa di Kecamatan Jasinga sudah pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa sebanyak 1 sampai 2 kali tetapi pelatihan tersebut tidak dibarengi dengan adanya pelatihan yang lebih spesifik dan kompleks yaitu pelatihan pencatatan transaksi secara akrual, hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan keuangan desa karena menyebabkan penyajian informasi keuangan yang kurang akurat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, peneliti merasakan keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembagian kuesioner, terdapat 1 desa yang tidak mau menjawab pertanyaan kuesioner karena takut akan terjadi sesuatu apabila ia mengisi kuesioner yang telah dibagikan.
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini hanya dengan menggunakan kuesioner, hal ini dilakukan karena mengingat kepala desa dan sekretaris desa memiliki jam kerja yang kompleks, sehingga penelitian tidak dapat melakukan wawancara lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mengerucut mengenai pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Jasinga.
3. Kompleksnya tugas aparaturnya dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparaturnya selaku responden dalam penelitian ini tidak dapat dikontrol secara pasti apakah terdapat kepastian kejujuran dari tiap jawaban responden.
4. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terdapat pada 1 Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Jasinga, sehingga sampel yang digunakan masih

Hidayah, 2023

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, KUALITAS PENGAWASAN BPD, DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Desa di Kecamatan Jasinga)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terbatas dan belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan desa di Indonesia khususnya pada wilayah Kabupaten Bogor.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan, kesimpulan, dan juga keterbatasan penelitian di atas, maka saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut

1. Untuk pemerintah desa

- 1) Aparatur desa di Kecamatan Jasinga sebagai pengelola keuangan desa sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya transparansi karena pelaksanaan transparansi mengacu pada implementasi Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu aparatur desa wajib untuk melaksanakan keterbukaan kepada masyarakat meliputi penyediaan LRA dan informasi APBDes. Adanya informasi keuangan pada kantor desa mencerminkan pemerintah desa sudah menerapkan prinsip transparansi dan mematuhi peraturan yang berlaku.
- 2) Aparatur desa di Kecamatan Jasinga seharusnya tidak hanya mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa saja seperti pelatihan pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mengikuti pelatihan manajerial seperti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang lebih kompleks yaitu mengacu pada pelatihan pencatatan berbasis akrual, sehingga pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi keuangan desa yang lebih komprehensif agar nantinya pemerintah desa dapat mengidentifikasi risiko keuangan di masa depan.
- 3) Aparatur desa pada desa di Kecamatan Jasinga yang mengelola keuangan desa sebaiknya berlatar belakang akuntansi atau keuangan, agar lebih memudahkan terhadap penyesuaian terhadap standar akuntansi yang berlaku dan perubahan-perubahan regulasi sehingga hal tersebut akan lebih meningkatkan keoptimalan pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Hidayah, 2023

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, KUALITAS PENGAWASAN BPD, DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Desa di Kecamatan Jasinga)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Bagi Penelitian mendatang yang akan meneliti dengan tema yang sama dengan penelitian ini di sebaiknya menambah variabel bebas yang diteliti misalnya partisipasi masyarakat agar memperoleh hasil yang lebih maksimal, yaitu adanya tanggapan yang berasal dari masyarakat.
- 2) Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner kepada pemerintah desa, peneliti sebaiknya dengan melakukan survey lokasi penelitian terlebih dahulu, agar mengetahui desa-desa yang bersedia untuk mengisi kuesioner. Sehingga jumlah responden penelitian dapat dicapai sesuai dengan target penelitian.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian dan tidak terfokus pada satu kecamatan saja melainkan penelitian dalam lingkup yang lebih besar yaitu penelitian se-Kabupaten Bogor.